



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SUB UNIT KERJA : BAGIAN KERJASAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI HANDAYANI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 224534

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/160 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/160 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	368.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000		
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	46.830.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	400.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	254.703.631
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.869.533.631
III. HUTANG	Rp.	248.249.465
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.621.284.166

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.